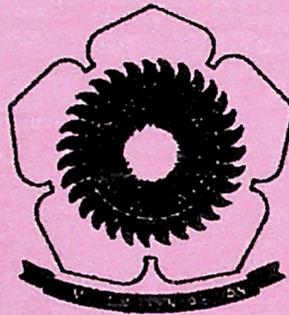


**PEMANFAATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP)
PADA MASYARAKAT KELURAHAN SIALANG KECAMATAN SAKO
PALEMBANG**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Sosiologi**



Oleh:

INRARIADY WIDARTA

07043102030

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2011

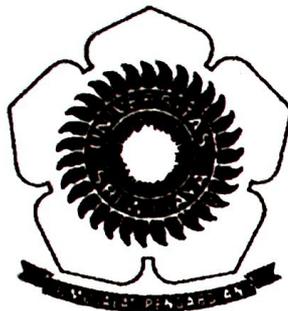
S
361.607
lur
P
e-011042
2011

**PEMANFAATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP)
PADA MASYARAKAT KELURAHAN SIALANG KECAMATAN SAKO
PALEMBANG**



Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana Sosiologi**



Oleh:

INRARIADY WIDARTA

07043102030

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2011

**PEMANFAATAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
(PNPM-MP)
PADA MASYARAKAT KELURAHAN SIALANG
KECAMATAN SAKO PALEMBANG**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
Dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat dari
Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal, 28 April 2011

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Drs. Mulyanto, MA

Ketua



Diana Dewi Sartika, S.Sos, MSi

Anggota



Dr. M. Ridhah Taqwa

Anggota



Drs. H. Sulaiman Mansyur, LC.

Anggota



Indralaya, April 2011

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

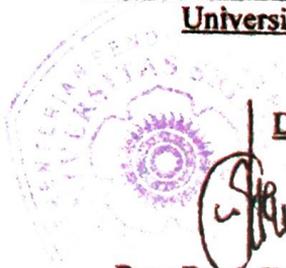
Universitas Sriwijaya

Dekan,



Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si

NIP.196010021992032001



Moto:

Hidup Ini Hanya Sekali.....

*Maka Jangan Pernah Kamu Sia-Siakan Waktu Dan
Menunda Sesuatu Yang Dapat Kamu Kerjakan Saat Ini,
Karena Waktu Tidak Akan Pernah Kembali Lagi*

*Tidak Ada Permasalahan Yang Tidak Dapat Di Selesaikan
Asal Kita Mau Mengomunikasikannya*

— Inrariady Widarta —

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang selalu menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan. Karena rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Masyarakat Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang”**.

Pembuatan Skripsi bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang. Penyusunan skripsi ini sendiri tak lepas dari bantuan moril dan materil dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Bapak Dr Zulfikri Suleman, MA selaku Ketua jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Mulyanto, MA selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk membantu kelancaran skripsi ini.
4. Ibu Diana Dewi Sartika, S.Sos,M.Si Dosen Pembimbing II. Terima Kasih atas semua arahan, bimbingan dan kesabaran untuk membantu kelancaran skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sriwijaya Palembang atas ilmu, pengalaman, dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang.
6. Bapak Ketua BKM Sialang Madani Nur Helmi.
7. Kedua orang tuaku yang tercinta dan saudara-saudaraku yang sangat kusayangi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dengan caranya masing-masing

Penulis

INRARIADY WIDARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Tinjauan Pustaka.....	8
1.4.1. Penelitian yang Relevan.....	17
1.5. Metode Penelitian.....	21
1.5.1. Desain Penelitian	21
1.5.2. Lokasi Penelitian	22
1.5.3. Unit Analisis	22
1.5.4. Penentuan Informan	22
1.5.5. Definisi Konsep	23
1.5.6. Data dan Sumber Data	24
1.5.7. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.5.8. Teknik Analisis Data.....	26

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kemiskinan	28
2.2. Pemberdayaan	30



2.3. Pemanfaatan	37
2.4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan...	38

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

3.1. Gambaran Umum Wilayah	48
3.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah	48
3.1.2. Batasan Wilayah	48
3.1.3. Kependudukan	49
3.2. Profil Kelurahan Sialang.....	51
3.2.1. Sejarah Kelurahan Sialang	51
3.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	51
3.2.3. Sarana dan Prasarana	52
3.3. Gambaran Umum Informan.....	53

BAB IV ANALISA DAN INTERPRESTASI DATA

4.1. Program Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Sialang.....	54
4.2. Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Sialang.....	55
4.3. Kendala Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Sialang.....	78
4.3.1. Masalah Pendanaan	78
4.3.2. Penentuan Waktu Kegiatan dan Partisipasi Masyarakat yang Belum Maksimal	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....	83
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas Wilayah Kelurahan Sialang	48
Tabel 2. Sebaran Penduduk Berdasarkan Usia	49
Tabel 3. Persebaran Penduduk Menurut Golongan Umur/Usia Kelurahan Sialang	49
Tabel 4. Bangunan Gedung/Kantor di Kecamatan dan Kelurahan.....	52
Tabel 5. Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan Sialang	53
Tabel 6. Karakteristik Program Pengentasan Kemiskinan Di Kel Sialang	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Pelaksanaan Tri-Daya.....	42
Gambar 2. Bagan Kerangka Teori	47

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan PNPM-MP di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang.

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan unit analisis adalah masyarakat dalam pemanfaatan PNPM MP di kelurahan Sialang. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam pada delapan belas orang informan serta dengan melakukan observasi secara langsung dan kajian dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan PNPM-MP pada masyarakat Kelurahan Sialang telah berjalan sesuai dengan fungsi sebagai pemberdayaan dan batasannya Nilai & Prinsip PNPM-MP, Konsep Tridaya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan Sialang dalam pemanfaatan PNPM-MP berupa masalah pendanaan dan penetapan waktu pelaksanaan program.

Kata kunci: Pemanfaatan, PNPM-MP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah problem klasik yang senantiasa ada dan tampak secara nyata dalam kehidupan masyarakat baik di pedesaan maupun perkotaan. Kenyataannya walaupun tampak jelas keberadaannya, untuk mengatasi atau menanggulangi kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Kebanyakan orang mengartikan kemiskinan sebagai kekurangan atau tidak memiliki harta, kekurangan makanan, yang semua dididasi oleh rendah atau minimnya penghasilan.

Penanggulangan kemiskinan lebih banyak diarahkan hanya pada peningkatan penghasilan masyarakat miskin lewat berbagai program ekonomi, seperti pemberian kredit lunak dan sebagainya. Semua itu tidak dapat disangkal akan meningkatkan penghasilan masyarakat miskin tetapi tidak serta merta menyelesaikan persoalan kemiskinan. Menurut Sumodiningrat (1998: 26) kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang kompleks dan bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Secara umum kemiskinan sering kali diartikan sebagai keterbelakangan, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan seseorang untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap layak/manusiawi.

Masalah-masalah kemiskinan pada umumnya, khususnya kemiskinan di perkotaan banyak diakibatkan karena kedudukan kota sebagai pusat kekuasaan dan dominasi perputaran ekonomi yang kemudian mendorong masyarakat desa

berurbanisasi kekota. Orientasinya adalah untuk dapat memperoleh kesejahteraan dengan meningkatnya penghasilan mereka. Akan tetapi orientasi tersebut tidak dibarengi dengan pendidikan dan keahlian yang memadai. Pada akhirnya tidak mendapatkan pekerja dan penghasilan yang layak sehingga semakin menambah jumlah penduduk miskin perkotaan.

Kemiskinan diperkotaan ditandai dengan kondisi masyarakat yang tidak memiliki akses keprasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu (dalam Buku Pedoman Umum P2KP, 2005). Problematika sosial masyarakat perkotaan yang diakibatkan kemiskinan seperti; pendidikan rendah, kesehatan buruk, pengangguran, gizi buruk, perumahan kumuh, meningkatnya angka kriminalitas dan lain-lain.

Berdasarkan data statistik bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 1,51 juta (Badan Pusat Statistik, 2010).

Penanggulangan masalah kemiskinan diperkotaan memerlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Menurut Sumodiningrat (1998: 46-47) Kebijakan pengentasan atau penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebijakan tidak langsung, dan kebijakan yang langsung. Dalam hal ini, kebijakan

pembangunan yang integral menyediakan alasan munculnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, efektivitasnya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sendiri pertama digulirkan pada tahun 2007 diantaranya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Program ini berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan.

Menurut Sumodiningrat (1998: 47) dalam upaya mengentaskan kemiskinan program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat serta hasilnya bisa di manfaatkan secara optimal sesuai fungsi pokoknya yaitu meningkatkan kesejahteraan. Program harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak berdaya untuk menjadi berdaya. Perlu dipahami bahwa pemberdayaan dan partisipasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan. Masyarakat yang “tidak berdaya” perlu untuk dibuat “berdaya” dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan. Dengan proses pemberdayaan ini diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat. Partisipasi yang lemah dapat disebabkan oleh kekurangan kapasitas dalam masyarakat tersebut, sehingga peningkatan kapasitas perlu dilakukan (Soegijoko dkk, 1997: 179).

PNPM-MP sebagai proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan mengedepankan pendekatan TRI-DAYA, yang merupakan aktualisasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu: perlindungan dan kelestarian lingkungan, perlindungan dan pembangunan sosial serta pengembangan ekonomi. Dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan PNPM-MP ini merupakan kesediaan untuk mensukseskan program nasional yang diambil sebagai kebijakan pemerintah. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan PNPM-MP ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilan program tersebut. Disinilah letak pentingnya pemanfaatan program oleh masyarakat.

Menurut Mulyani (www.antaraneews.com. Akses tanggal 4 Agustus 2010) menjelaskan berdasarkan hasil dari penelitian, apabila PNPM dapat berjalan

dengan baik, maka akan ada 24 juta orang akan mendapat pekerjaan, dan dampak ikutannya akan ada 16 juta rakyat miskin akan mendapat manfaat dari itu, serta 5,9 juta mendapatkan kenaikan penghasilan.

Kebijakan pemerintah kota Palembang melaksanakan PNPM-MP untuk menanggulangi persoalan kemiskinan masyarakatnya. Bukanlah kebijakan yang bersifat reaktif terhadap kebijakan pemerintah pusat, namun juga bersifat strategis karena dalam kegiatan ini mendorong pemampuan masyarakat untuk mencari solusi atas problem kemiskinan masyarakat kota Palembang (Bappeda, 2008).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu masalah pokok akibat kemiskinan perkotaan adalah lingkungan yang tidak nyaman dan kurang sehat. Dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Sialang, difokuskan untuk memberdayakan masyarakat Sialang (membangun manusianya), sehingga secara sosial akan membangun sosial kapital di masyarakat Sialang untuk mewujudkan komunitas yang efektif, dan secara ekonomi mampu mewujudkan komunitas yang produktif, serta secara lingkungan, mampu menumbuhkan daya pembangunan masyarakat Sialang untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, produktif dan lestari. Hal tersebut sesuai dengan pendekatan TRI-DAYA dalam pedoman PNPM-MP. Satu hal yang harus ditekankan disini bahwa masalah lingkungan merupakan masalah sosial dengan fokus kepada budaya, kekuasaan, politik dan hubungannya dengan pemerintahan dan ekonomi, dan isu sosial lain setempat.

Masalah sosial yang dihadapi masyarakat Sialang yang disebabkan kemiskinan seperti; pendapatan yang rendah, pendidikan, kesehatan,

pengangguran, lingkungan hunian yang kurang kondusif dan lain-lain. Masalah lingkungan merupakan faktor masalah utama yang terjadi di Kelurahan Sialang meliputi jalan lingkungan/lorong yang buruk, tidak adanya saluran air limbah/pembuangan, gorong-gorong, bak sampah. Masalah lingkungan menjadi perhatian serius karena lingkunganlah yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesehatan, kehidupan masyarakat dan perkembangan sosial ekonomi.

Uraian diatas tersebut yang kemudian meletakkan masalah lingkungan menjadi prioritas dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Sialang. Namun demikian, dalam pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) haruslah tetap memilah dan memilih program lingkungan mana yang patut didahulukan. Jangan sampai terkesan sekedar bagi-bagi dana BLM pada masing-masing Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jika ini yang terjadi, maka akan banyak bermunculan proyek-proyek rekayasa yang hanya sekedar untuk mendapatkan dana BLM. Proyek-proyek semacam ini didesain seolah-olah dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang kenyataannya tidak memberikan manfaat sedikitpun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan jauh dari sasaran tujuan PNPM-MP itu dilaksanakan.

Pemanfaatan yang semacam ini pada akhirnya, berpotensi menjadi hambatan bagi pemanfaatan dana BLM sebagaimana diamanatkan dalam misi PNPM-MP. BLM sebagai dana stimulan seharusnya mampu menjadi pemicu peningkatan kemampuan ekonomi yang dikelola dan bertanggung jawab sepenuhnya dari dan oleh masyarakat pemanfaat sehingga berkelanjutan. Dengan

demikian ini merupakan perwujudan dari upaya pemberdayaan (*empowerment*) sekaligus pemampuan (*enawhlement*) dan partisipasi aktif masyarakat.

Gambaran kesesuaian pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat seperti telah diuraikan di atas, akan menjadi tolak ukur terhadap ketepatan pemanfaatan PNPM-MP secara keseluruhan bagi Kelurahan-kelurahan pelaksana program. Atas dasar gambaran tersebut muncul pertanyaan dalam benak penulis “Bagaimana pemanfaatan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sialang, yang merupakan salah satu dari pelaksana PNPM-MP?”. Hal inilah yang kemudian mendorong penulis ingin meneliti lebih mendalam bagaimana Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Pada Masyarakat Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka persoalan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) pada masyarakat Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemanfaatan PNPM-MP di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pemanfaatan PNPM-MP di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Memberikan informasi bagi pembaca dan penulis lain sebagai inspirasi untuk dikembangkan ke topik lain. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai pemanfaatan yang optimal dari Program Nasional Peberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

1.4 Tinjauan Pustaka

Seringkali pemikiran mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan pada segi-segi ekonomi saja, sehingga usaha memahami hakekat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur. Akibat yang dialami dengan keadaan seperti ini adalah, usaha penanggulangan kemiskinan bersifat parsial, tidak komprehensif, serta hasil yang dicapai dari segala upaya penanggulangan tersebut menjadi tidak tepat sasaran (Suparlan, 1993: 5).

Makna kemiskinan bukan lagi ketidakadilan dalam memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi lebih ditekankan pada

pemerataan kesempatan untuk mendapatkan hak-hak dasar, yang dimulai sejak manusia lahir. Pergeseran makna kemiskinan ini jelas terlihat dalam laporan Bank Dunia *Equity and Development* 2006 (Alhumami, 2009 <http://cetak.kompas.com/read/xml>), membahas isu pembangunan sosial dengan pendekatan lintas ilmu dan analisis multidimensional. Maka, pengukuran kemiskinan dipandang tidak memadai lagi bila hanya menggunakan indikator tingkat pendapatan per kapita atau per satuan rumah tangga. Karena itu, berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dengan maksud menambah kemampuan daya beli masyarakat, misalnya program bantuan langsung tunai, bukan saja tidak efektif tetapi tidak menyelesaikan akar kemiskinan. Kesenjangan pendapatan adalah gejala permukaan, sedangkan pangkal kemiskinan pada ketidakmerataan akses (*problem structural*) ke sumber daya ekonomi serta penguasaan aset dan kapital oleh kelompok kecil masyarakat. Situasi timpang ini melahirkan marjinalisasi, disposesi, deprivasi, dan eksklusi sosial sehingga masalah kemiskinan tak dapat diatasi hanya melalui kebijakan sementara dan sektoral (Alhumami, 2009 ; <http://cetak.kompas.com/read/xml>).

Kebijakan yang terintegral serta lintas sektoral oleh pemerintah dikemas dalam kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Salah satu program yang bernaung dalam bingkai PNPM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Program ini dikhususkan dalam mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat perkotaan. PNPM-MP memiliki fungsi sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan

masyarakat miskin di perkotaan (dalam buku Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, 2008).

PNPM-MP dalam pelaksanaannya menerapkan pendekatan TRI-DAYA yaitu melalui pengokohan kelembagaan masyarakat, sehingga nantinya diharapkan dapat tercipta wadah organisasi yang mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. Yang pada akhirnya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Kelembagaan masyarakat (BKM) yang bersifat lokal itulah diharapkan menjadi motor penggerak dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan sebagai nilai utama yang melandasi aktifitas penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Dalam pendekatan TRI-DAYA fokus program diarahkan untuk memberdayakan masyarakat (membangun manusianya), sehingga; secara sosial akan membangun sosial kapital di masyarakat untuk mewujudkan komunitas yang efektif, secara ekonomi mampu mewujudkan komunitas yang produktif, dan secara lingkungan, mampu menumbuhkan daya pembangunan di masyarakat untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, produktif dan lestari.

Menurut Chambers (1995) Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (dalam Kartasasmita, 1996:56). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan

dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu.

Menurut Prijono dan Pranarka (1996: 63), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Soegijoko dkk, (1997: 179) Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. *Pertama*, pendekatan yang terarah, artinya pemberdayaan masyarakat harus terarah yakni berpihak kepada orang miskin. *Kedua*, pendekatan kelompok, artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi. *Ketiga*, pendekatan pendampingan, artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendamping yang profesional sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

Berdasar pada konsep pemberdayaan yang telah diuraikan diawal, kaitannya dengan fungsi pemberdayaan masyarakat miskin yang dimiliki PNPMP ini dapat penulis artikan, bahwa apapun komponen dan tahapan yang ada dalam pemanfaatan PNPMP haruslah berfungsi untuk memberdayakan

masyarakat miskin. Hasilnyapun harus bisa di manfaatkan secara maksimal, membuka akses dan menciptakan peluang partisipasi masyarakat miskin pemanfaat program.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat semestinya melibatkan langsung/tidak langsung berbagai elemen masyarakat dengan harapan program-program pemberdayaan masyarakat itu akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat atas program tersebut. Dalam pemberdayaan masyarakat, partisipasi menduduki posisi penting, karena memiliki tujuan dan fungsi yang strategis. Tujuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, yakni menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, memupuk keswadayaan (*sharing*-jiwa berbagi), meneguhkan rasa tanggungjawab, merasa memiliki dan mau memelihara atas hasil dan pasca kegiatan serta mengembangkannya. Sedangkan fungsinya, antara lain tidak sedikit kegiatan yang bisa diselesaikan, meminimumkan dana/anggaran, memiliki nilai tambah, tanggungjawab tinggi, mengakomodir kebutuhan, pemanfaatan/penggunaan sumberdaya alam dan manusia dapat optimum (Marjono, 2008: <http://intanghina.wordpress.com>).

Menurut Sumodiningrat (1999: 223) menjelaskan bahwa model yang demikian itu menekankan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan model pembangunan tersebut, dapat dikemukakan bahwa suatu proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah. Pemberian kewenangan kepada masyarakat setempat yang tidak hanya untuk

menyelenggarakan proyek/program pembangunan, tetapi juga untuk mengelola dan memanfaatkan proyek tersebut akan mendorong masyarakat untuk mengerahkan segala kemampuan dan potensinya demi keberhasilan proyek/program tersebut. Pada gilirannya keberdayaan masyarakat setempat menjadi baik sebagai akibat dari meningkatnya kemampuan dan kapasitas masyarakat.

Partisipasi masyarakat yang lemah dalam program semacam PNPM-MP dapat disebabkan oleh karena kurangnya kapasitas dalam masyarakat tersebut, sehingga peningkatan kapasitas perlu dilakukan. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terlebih dahulu masyarakatnya harus dibuat berdaya melalui model-model pemberdayaan. Sebagaimana yang dilakukan kelurahan Sialang, melalui pendekatan pemberdayaan diharapkan partisipasi masyarakat Sialang dalam pemanfaatan PNPM-MP akan meningkat. Karena pada dasarnya PNPM-MP berupaya membangkitkan partisipasi masyarakat agar ikut serta dalam menjalankan program dan memanfaatkan hasil program tersebut.

Menurut Sambroek dan Eger (1996) partisipasi merupakan suatu proses dimana seluruh pihak terkait (*stakeholder*) secara aktif terlibat dalam rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Pelibatan semua kelompok tidak selalu berarti secara fisik terlibat, tetapi yang penting adalah prosedur pelibatan menjamin seluruh pihak dapat terwakili kepentingannya (dalam Dewi R Indrawati, dkk, 2003:2-3). Partisipasi masyarakat Sialang dalam memanfaatkan PNPM-MP ini merupakan kesediaan untuk mensukseskan program-program yang telah direncanakan dan disepakati bersama sehingga

pemanfaatannya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pengentasan kemiskinan di Sialang.

Terdapat 4 (empat) komponen utama proyek yang akan dilaksanakan dalam PNPM-MP, (1) Bantuan Teknis Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah; (2) Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); (3) Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET); (4) Dana Dukungan “Pembangunan Lingkungan Permukiman Kelurahan Terpadu”. PNPM-MP meletakkan sasaran utamanya kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tergolong kalangan ekonomi lemah untuk ditumbuhkan kemandiriannya. Sehingga bukan masyarakat miskin secara perseoranganlah yang akan diberdayakan, melainkan sejumlah orang dalam masyarakat yang tergabung dalam suatu wadah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang dikenai tindakan (*treatment*) berupa pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) (dalam Buku Pedoman Umum P2KP, 2005).

Komponen Bantuan Teknis Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah; merupakan serangkaian kegiatan pelatihan, proses-proses pembelajaran, dan penggalan pengalaman, serta sejumlah lokakarya/rembuk masyarakat yang sesungguhnya ditujukan untuk membangun kesadaran kritis, kepedulian (*awareness*), dan memotivasi para pelaku PNPM MP untuk menjalankan perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang dimulai dengan dirinya atau lingkungan kerjanya. Kegiatan masyarakat kelurahan Sialang terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan, studi banding yang dilakukan secara selektif. Kaitannya dengan



upaya pengembangan masyarakat telah dilakukan serangkaian kegiatan oleh masyarakat kelurahan Sialang seperti halnya pemetaan potensi masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

Komponen penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan bantuan proyek sebagai sarana pembelajaran warga yang secara bebas dapat digunakan oleh masyarakat kelurahan sasaran sesuai dengan hasil pemetaan swadaya dan rumusan kegiatan yang dicantumkan dalam PJM Pronangkis (Program Jangka Menengah-Penanggulangan Kemiskinan). Merujuk dari aturan yang ada penggunaan BLM oleh masyarakat kelurahan Sialang dialokasikan untuk: kegiatan santunan sosial untuk fakir miskin, orang jompo, dan anak yatim piatu, perbaikan dan peningkatan sarana fisik lingkungan dasar, pelatihan kelompok serta kegiatan yang sifatnya membangun kapasitas dan daya saing masyarakat.

Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET); merupakan stimulan untuk meningkatnya kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga terjadi pembelajaran dalam penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan secara lebih terarah dengan mengakomodasikan

kebutuhan masyarakat dan pemda serta dilaksanakan secara transparan, efektif dan akuntabel. Dana Dukungan “Pembangunan Lingkungan Permukiman Kelurahan Terpadu” merupakan suatu dukungan bagi BKM yang sudah mencapai kualifikasi kinerja “mandiri” agar dapat lebih berdaya dalam mengakomodasikan berbagai inisiatif dan aspirasi dari masyarakat dalam upaya terwujudnya tata kehidupan yang lebih baik dan harmonis. Pemanfaatannya untuk membiayai berbagai kegiatan masyarakat selama proses perencanaan pembangunan lingkungan permukiman kelurahan secara terpadu (masterplan kelurahan) yang disepakati bersama dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan pelayanan publik yang baik, dan peduli masyarakat miskin (*pro-poor good governance*). Dua komponen ini belum dijalankan atau diterima masyarakat Kelurahan Sialang, karena komponen Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) dan Dana Dukungan (Pembangunan Lingkungan Permukiman Kelurahan Terpadu) diberikan ketika kualifikasi kinerja BKM sudah dalam tahap mandiri.

PNPM-MP telah memiliki siklus yang cukup rapi dimana antara satu tahapan dengan lainnya memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Berdasar itu dalam penerapannya, program tersebut mesti dipahami secara utuh dan menyeluruh kepada masyarakat yang menerima agar dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Jika masyarakat hanya diperkenalkan satu tahapan tanpa terlebih dulu memahami tahapan lain atau tahapan sebelum dan sesudahnya, maka dapat dipastikan masyarakat akan keliru memahami tahapan tersebut, dan selanjutnya akan berimplikasi pada kesalahan memahami PNPM-

MP secara keseluruhan. Untuk menghindari hal itu, PNPM-MP menegaskan, setiap tahapan dari siklus mesti mengacu pada substansi pemberdayaan yang di dalamnya terdapat nilai pembelajaran yang amat berarti bagi masyarakat. ini merupakan perwujudan dari upaya pemberdayaan (*empowerment*) sekaligus pemampuan (*enawhlement*) masyarakat dalam jangka panjang sebagai syarat menuju terbentuknya kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut Delfgaauw (1990: 57) Pemanfaatan berarti penggunaan sesuatu sesuai dengan fungsinya sampai batasnya. Sebuah program semacam PNPM-MP agar dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan hakekat tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat, untuk itu masyarakat harus memiliki pengetahuan dan memahami secara komprehensif program tersebut. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif, sangat mustahil masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik. Ini berlaku juga terhadap masyarakat kelurahan Sialang sehingga pemanfaatan PNPM-MP mampu memandirikan dan membuat berdaya masyarakat miskin serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya.

1.4.1 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program PNPM-MP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) proyek ini sebenarnya telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih, (2007), penelitian ini berjudul "Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi Kasus di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Semarang Tahun 2003 - 2005)". Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa implementasi (Proyek Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan) dapat dikatakan berjalan lancar. Hal ini dilihat dengan semakin bertambahnya jumlah KSM yang pada awal pelaksanaan proyek ini berjumlah 25 KSM dapat berkembang menjadi 102 KSM. Dengan kemampuan mengembalikan angsuran yang tergolong lancar, dan pencapaian target dari perencanaan dan realisasi di BKM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Prayitno (2007) dalam tulisannya (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) mengungkapkan manfaat yang diperoleh dengan dibentuknya BKM adalah, meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengembangkan peri kehidupan, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan memprakarsai kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan dan keuangan) mereka sendiri secara berkelanjutan, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan kegiatan dan program pembangunan mereka sendiri, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan.

Penelitian Yugissira (2008) yang berjudul "Penerapan Prinsip Akuntabilitas program penganggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dalam implementasi kegiatan pemberdayaan ekonomi di Kelurahan Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang" dalam penelitiannya ia mengatakan penerapan akuntabilitas (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) belum akuntabel dan belum sepenuhnya sesuai prosedur program (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Hal ini dilihat dari jumlah fasilitas peralatan untuk menunjang pelatihan tidak sebanding dengan jumlah peserta, ketidaktahuan masyarakat akan jumlah dana program (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) dalam pemberdayaan ekonomi, masyarakat tidak

mengetahui siapa pelaksana kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut, serta belum adanya laporan pertanggung jawaban kegiatan baik dari pelaksana kegiatan kepada BKM atau juga dari BKM kepada masyarakat.

Belum akuntabelnya program (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) di Sungai Buah ini antara lain disebabkan kurangnya biaya operasional untuk para pengawas lapangan. BKM tidak mengetahui perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah mengikuti kegiatan ekonomi pelatihan, yaitu perubahan pada tingkat kemandirian masyarakat sehingga berdampak terlambatnya penciptaan peluang usaha baru bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Irma Novita Sari (2010) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, dengan judul Analisis Peranan Pemberian Bantuan Modal (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penelitian diperoleh bahwa sasaran penerima bantuan modal P2KP ialah KSM yang beranggotakan minimal tiga orang dan berasal dari keluarga yang berbeda, berpenghasilan rendah serta mempunyai usaha atau akan memulai usaha. Prosedur pengajuan pinjaman tidak menyulitkan, persyaratan yang sedikit sulit dipenuhi ialah pembuatan proposal usaha.

Hasil penelitian menunjukkan 87 responden atau 92,55% dari total responden menyatakan adanya peningkatan pendapatan setelah memperoleh bantuan modal (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Dilihat dari indikator keberhasilan sasaran penerima bantuan dikatakan berhasil tetapi dari indikator tingkat pengembalian pelaksanaan (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) di Kelurahan Sumbersari dikatakan belum berhasil karena tingkat

pengembalian masih belum memenuhi kriteria. Dilihat dari indikator dampak bantuan modal dikatakan berperan dalam peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan sebagian besar digunakan untuk konsumsi, hal ini terlihat pada persentase peningkatan pendapatan yang tidak diimbangi dengan persentase kenaikan tabungan Bantuan modal (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) juga telah mampu meningkatkan kegiatan produksi usaha hal ini tampak dari meningkatnya omzet usaha masyarakat. Status sosial keluarga yang dilihat melalui status keluarga sejahtera juga mengalami peningkatan, walaupun memang tidak banyak keluarga yang mengalami peningkatan status sosial keluarga.

Selanjutnya penelitian Raharjo (2009) dengan judul “Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri bagi keluarga miskin di desa lamuk kec. Kejobong kab. Purbalingga” dari hasil penelitiannya diperoleh bahwa implementasi PNPM berjalan dengan lancar, dilihat dari program perbaikan irigasi dan sarana air bersih, hasil yang dicapai ketepatan sasaran 60,23%, ketepatan tujuan 62,50% ketepatan manfaat 46,60%, kendala yang dihadapi adalah rumitnya administrasi serta rendahnya swadaya masyarakat terkait kebutuhan tenaga swadaya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang telah dilakukan sebelumnya, dan sepengetahuan peneliti, penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian yang akan dilakukan akan menggambarkan dan menganalisis bagaimana pemanfaatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang serta mengetahui kendala-kendalanya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Desain Penelitian

Berpijak pada apa yang menjadi tujuan penelitian ini, yang mencoba untuk menggambarkan bagaimana pemanfaatan program PNPM Mandiri dan kendala-kendalanya tersebut, ditambah lagi pertimbangan akan biaya, waktu, jarak serta ketelitian, maka peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif.

Berkaitan dengan pengertian metode deskriptif menjelaskan bahwa penelitian ditinjau dari hadirnya variabel dan saat terjadinya, maka penelitian yang dilakukan menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi), adalah penelitian deskriptif (*to describe*: menggambarkan atau membeberkan (Arikunto, 1998; 10). Hal ini sejalan yang dikemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988: 63). Maksud metode deskriptif dalam penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan program PNMP-MP di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini akan mengungkapkan suatu fenomena sosial sesuai dengan kerja yang teratur melalui pemikiran yang matang dan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian kualitatif secara umum bersifat

emik, dimana metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara yang menghasilkan temuan yang bervariasi, yang akan ditampilkan secara naratif.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil tempat di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang, yang merupakan salah satu Kelurahan pelaksana program PNPM-MP di Kota Palembang. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja didasari pertimbangan sebagai berikut:

1. Kelurahan Sialang merupakan kelurahan yang berpenduduk cukup heterogen dari berbagai macam klasifikasi latar belakang yang berbeda.
2. Tidak ditemukan adanya keaduan masyarakat atas pelaksanaan program PNPM-MP.

1.5.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam pemanfaatan program PNPM-MP di Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang yaitu dari masyarakat dan pengelola.

1.5.4 Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 1998: 90). Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu teknik yang bertujuan mengambil informan dari orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti dengan persyaratan yang dibuat sebagai kriteria.

Adapun kriteria-kriteria digunakan untuk menentukan informan yaitu; (1) masyarakat setempat; (2) Pihak atau orang yang mengetahui secara mendalam

mengenai pemanfaatan PNPM-MP; (3) orang-orang yang terlibat secara langsung sebagai pengelola PNPM-MP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) dan penerima manfaat program di kelurahan Sialang kecamatan Sako Palembang. Penelitian kali ini informannya direncanakan sejumlah 18 orang.

1.5.5 Definisi Konsep

1. **Manfaat** adalah segala sesuatu yang memiliki daya guna atau fungsi.
2. **Pemanfaatan** adalah penggunaan sesuatu sesuai dengan fungsi sampai pada batasnya (Delfgauw, 1990: 57).
3. **PNPM Mandiri** adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM-MP yang dilaksanakan di daerah perkotaan adalah Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). PNPM-P2KP adalah program yang ditujukan pada arah pengembangan pembangunan masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat, dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan keberlanjutan.
4. **Kendala** dengan kata lain masalah adalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal

1.5.6 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer menurut Marzuki (1997: 56) merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, tanpa melalui pihak kedua, kedua dan ketiga dan seterusnya. Penelitian kualitatif sebagai sumber data utama (primer) ialah kata-kata dan tindakan yang dicatat melalui catatan tertulis atau media lain (Basrowi dan Suwandi, 2008: 169). Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh peneliti adalah catatan hasil wawancara langsung dengan informan di kelurahan Sialang.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan diusahakan sendiri, dengan kata lain merupakan data penunjang yang berhubungan atau berkaitan dengan tema penelitian yang sedang peneliti jalankan. Data sekunder dimaksud berupa dokumen pelaksanaan PNPM-MP, dokumen penelitian yang ada kaitanya dengan tema penelitian dari studi pustaka, koran, jurnal, website, keterangan-keterangan dan jenis lainnya.

1.5.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Penulis mengambil data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu pengamatan secara langsung tentang objek atau daerah penelitian. Pengumpulan data yang akan dilakukan penulis pada penelitian ini akan menggunakan tiga teknik yang saling melengkapi:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah dialog (tanya jawab) yang dilakukan oleh pewawancara sebagai pemberi pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dikehendaki dari yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Basrowi dan Suwandi, 2008: 127). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara (Basrowi dan Suwandi, 2008: 128). Petunjuk umum atau pedoman wawancara yang digunakan sebagai acuan wawancara oleh peneliti hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang tujuan penelitian ini dilakukan agar menjaga dalam proses wawancara pokok-pokok yang peneliti tuju tercakup secara keseluruhan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung berbagai pendapat, pandangan, opini dan penilaian anggota masyarakat Sialang, anggota BKM Sialang Madani dan KSM, elit masyarakat Sialang khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan PNPM-MP. Wawancara dilakukan pada sumber-sumber yang dianggap paling mengetahui tentang pemanfaatan PNPM-MP di kelurahan Sialang.

2. Observasi

Penggunaan teknik ini bertujuan agar penulis dapat melakukan pengamatan secara lebih objektif pada keadaan yang sebenarnya, yang ada dalam masyarakat Sialang maupun hubungan diantara BKM Sialang Madani dan pemerintah Kelurahan Sialang. Hasil pengamatan

tersebut akan dicatat secara sistematis, dan data yang terkumpul dari observasi termasuk kedalam jenis data primer dari penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data-data tertulis itu diperoleh dari sumber-sumber dokumen buku-buku, Koran, majalah, Pedoman PNPM-MP (P2KP), Info Ringkas PNPM-P2KP, Pedoman Teknis Pembentukan BKM, PJM Pronangkis BKM Sialang Madani, Laporan BKM Sialang Madani. Data-data ini diharapkan dapat menunjang dan melengkapi sekaligus *cross-check* dari hasil pengumpulan data primer serta mendapatkan data-data yang tidak didapatkan dari hasil wawancara.

1.5.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Haberman (1992) (dalam Bungin, 2003: 229) terdapat tiga tahapan analisis data yaitu:

1. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan transformasi data kasar yang muncul dari data lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian yang dilakukan dengan cara membuat abstraksi yang merupakan

rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu dijaga keaslian datanya sehingga tidak merubah makna sebenarnya.

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu, artinya data tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program PNPM-MP akan peneliti sajikan dalam bentuk cerita misalnya bagaimana bentuk pemanfaatan yang dilakukan BKM, apa saja yang menjadi kendala-kendalanya. Selanjutnya data tersebut akan diringkas dan disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti oleh semua pihak.

3. Tahap Kesimpulan (verifikasi)

Pada tahap ini peneliti memberikan kesimpulan data yang telah diproses pada tahap 1 dan dan ke-2 di atas secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Amich. (2009). Menggugat Makna Kemiskinan. <http://cetak.kompas.com/read/xml>. (diakses 03/05/2010).
- Ali, Faried. (1997). *Metodelogi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Alma, Buchari. (2008). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-8. Rineka Cipta. Yogyakarta.
- Astika, K. S. (2010). *Budaya Kemiskinan Di Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01, Tahun 2010.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Delfgaauw, Gossen Th. J. (1990). *Kapita Selekta Ilmu Ekonomi*.
- Dewi R Indrawati, Evi Irawan, Nana Haryanti, dan Dody Yuliantoro. (2003). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah (RLKT). *Jurnal Pengelolaan DAS Kajian Finansial Usaha Tani Surakarta Vol. IX, 1 2003 Hutan Rakyat Pada Strata Luas*.
- Hakim, Lukman. (2008). *Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan P2KP kota Palembang. Artikel*. Lokakarya dan Pelatihan BKM PNPM-P2KP Kota Palembang.
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996). *Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar FIA*. Unibraw. Malang.
- Kusuma, Sony. (2006). *P2KP-Urban Proverty Project*. Bandung.
- Marjono. (2008). *Revitalisasi Posyantekdes Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Makalah.
- Marzuki. (1997). *Metodologi Riset*. BPFE UII. Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya. Bandung.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Poerwadinanata, W.J.S. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: diolah kembali oleh pusat bahasa departement pendidikan nasional edisi ke-3*. Cetakan 1. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prayitno, Eddy (2007). *Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)*. Skripsi. MAP UNSRI. Palembang.
- Prijono, OS. & Pranarka, AMW.(1996). *Pemberdayaan; Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Raharjo, W. Imam. (2009). *Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri bagi keluarga miskin di desa lamuk kec. Kejobong kab. Purbalingga*. Skripsi. FE Unnes. Semarang.
- Sari, Irma Novita. (2010). *Analisis Peranan Pemberian Bantuan Modal P2KP terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kelurahan Sumpersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*. Skripsi, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Sastropetro, Santoso, R.A. (1998). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni. Bandung.
- Setyaningsih, Niken. (2007). *Implementasi Proyek Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi Kasus di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Semarang Tahun 2003 - 2005)*. Skripsi. UNSRI. Palembang.
- Soegijoko & Kusbiantoro. (1997). *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Sombroek, W & Helmut Eger. (1996). *What Do We Understand by Land Use Planning : A State of The Art Report in Entwicklung and Landlicher Raum*. 2/96, pp 3-7. Frankurt. Germany.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryati. (1984). *People's Participation in The Government's Land Rehabilitation Program in a Selected Sub Watershed of Upper Solo, Indonesia*. Institute of Social Community Development. University of Philippines.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1998). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1999). *Agenda Pemulihan Ekonomi: Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemberdayaan Dan Otonomi Daerah*. ed. 1.cetakan 1. Kipas Putih Aksara. Jakarta.

- Suparlan, Parsudi (Ed). (1993). *Kemiskinan Di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Supriatna, Tjahya. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tim BKM Sialang Madani (2010). *PJM Pronangkis BKM Sialang Madani 2010-2012*. Palembang.
- Tim P2KP. (2005). *Buku Pedoman Umum P2KP*. Departemen Pekerjaan Umum.
- Tim Pengendali PNPM Mandiri (2008). *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat..*
- Yugissira, Umi (2008). *Penerapan Prinsip Akutanbilitas program penganggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dalam implementasi kegiatan pemberdayaan ekonomi di Kelurahan Sungai Buah Kec. Ilir Timur I Kota Palembang*. Skripsi. UNSRI. Palembang.